



Keuangan Pemprov Dinilai Bermasalah

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014. Kepala Biro Humas BPK Yudi Ramdan menjelaskan, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Pemprov DKI 2014, BPK menemukan sejumlah pengeluaran tanpa bukti pertanggungjawaban dan pemindahan aset bermasalah.

Hal yang paling disorot ialah pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang akan dijadikan rumah sakit khusus kanker oleh Pemprov DKI. BPK menemukan, dalam pembelian lahan tersebut Pemprov DKI mengalami kelebihan pembayaran sebesar Rp151 miliar.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, harga belinya kelebihan. Selain itu, kami juga menemukan pembelian tidak sesuai dengan peruntukan teknisnya," papar Yudi kepada wartawan di Gedung BPK, Jakarta, kemarin.

Dari pemeriksaan, lanjut dia, BPK juga menemukan ada pemindahan aset Pemprov DKI kepada PT Trans Jakarta yang diikutsertakan sebagai penyertaan modal pemerintah (PMP), tapi belum tercatat secara resmi sebagai PMP. Pemindahan aset berupa properti tersebut pun belum ditentukan dalam Peraturan Daerah (Perda) No 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah sehingga dinilai menyalahi aturan.

Dalam temuan lainnya, BPK juga menemukan adanya pen-

"Kami wajib melakukan semua pemeriksaan hingga ke pemeriksaan fisik. Temuan ini telah kami paparkan ke pemprov."

Yudi Ramadan
Kepala Biro Humas
Badan Pemeriksa Keuangan

cairan dana di 15 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) senilai Rp268,87 miliar tanpa adanya bukti pertanggungjawaban penggunaan dana.

Tidak hanya itu, temuan BPK juga menunjukkan adanya penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tanpa didukung bukti memadai di 10 sekolah negeri senilai Rp203 juta.

Yudi menerangkan, temuan-temuan itu sudah diketahui oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Gubernur diberi waktu 60 hari untuk memberikan jawaban atas LHP BPK.

"Kami wajib melakukan semua pemeriksaan hingga ke pemeriksaan fisik. Temuan ini telah kami paparkan ke pemprov," kata Yudi.

Warisan

Dalam menanggapi temuan itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan semua fakta temuan BPK sudah bisa

dijawab dan diberikan bukti-buktinya oleh pemprov, bahkan hingga pemindahan aset di masa lalu. Namun, BPK sendiri kurang mengomunikasikan temuan-temuannya kepada pemprov.

"Harusnya dikomunikasikan lagi oleh mereka, jangan sampai salah catat," tuturnya.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan kesalahan pencatatan aset dan pengelolaan keuangan yang terjadi merupakan hasil dari kebobrokan birokrasi di masa lalu.

"Makanya saya minta standar BPK harus jelas juga dalam memeriksa. Kenapa zaman Pak Foke itu WTP (wajar tanpa pengecualian)," kata Ahok. (Put/J-4)